



OMNIBUS LAW

CIPTA LAPANGAN KERJA





Dengan teknik Omnibus Law, sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor.

TEROBOSAN HUKUM



11 KLASTER DALAM UU CIPTA KERJA

- Penyederhanaan Perizinan
- Persyaratan Investasi
- Ketenagakerjaan
- Pengadaan Lahan
- Kemudahan Berusaha
- Dukungan Riset dan Inovasi
- Administrasi Pemerintahan
- Pengenaan Sanksi
- Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM
- Investasi dan Proyek Pemerintah
- Kawasan Ekonomi



DISEDERHANAKAN
MENJADI





UU Cipta Kerja bermanfaat
untuk memperbaiki iklim
investasi dan mewujudkan
kepastian hukum

MENDORONG INVESTASI

TUJUAN

- Mempercepat transformasi ekonomi
- Menyelaraskan kebijakan pusat-daerah
- Memberi kemudahan berusaha
- Mengatasi problem regulasi yang tumpang tindih
- Menghilangkan ego sektoral

MENGAPA PERLU TEROBOSAN OMNIBUS LAW

- Menaikkan kemudahan berusaha dari peringkat **73** (2020) ke posisi **53** dunia
- Kebijakan horizontal & vertikal saling berbenturan
- Indeks regulasi Indonesia masih rendah
- Terdapat fenomena *hyper regulation* (regulasi berlebihan)
- Kebijakan tidak efisien
- UU bersifat sektoral, sering tidak sinkron & tidak ada kepastian hukum

Memangkas
pasal yang tidak
efektif

“**50 tahun** waktu yang dibutuhkan jika merevisi UU satu per satu. Melalui Omnibus Law, penyederhanaan regulasi bisa dipercepat.”

Presiden Jokowi, dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019, di Raffles Hotel, Jakarta, Kamis malam (28/11/2019) (SETKAB.GO.ID)





MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA

UU Cipta Kerja akan menciptakan lapangan kerja lebih banyak dibandingkan hanya 2-2,5 juta per tahun tanpa Omnibus Law

3 JUTA
lapangan kerja akan tercipta setiap tahun

KEBIJAKAN STRATEGIS CIPTA KERJA

- Peningkatan ekosistem investasi & kegiatan berusaha
- Perlindungan & kesejahteraan pekerja
- Kemudahan, pemberdayaan & perlindungan UMKM
- Peningkatan investasi pemerintah & proyek strategis nasional

HARAPAN

- Iklim investasi kondusif akan menyerap lebih banyak pekerja
- Pertumbuhan ekonomi meningkat, pengangguran berkurang
- Produktivitas pekerja meningkat

Visi Indonesia 2045

- 5 besar ekonomi terkuat dunia
- Rp 27 juta PDB per kapita per bulan



PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal-pasal terkait perizinan paling dominan diintegrasikan dalam UU Cipta Kerja

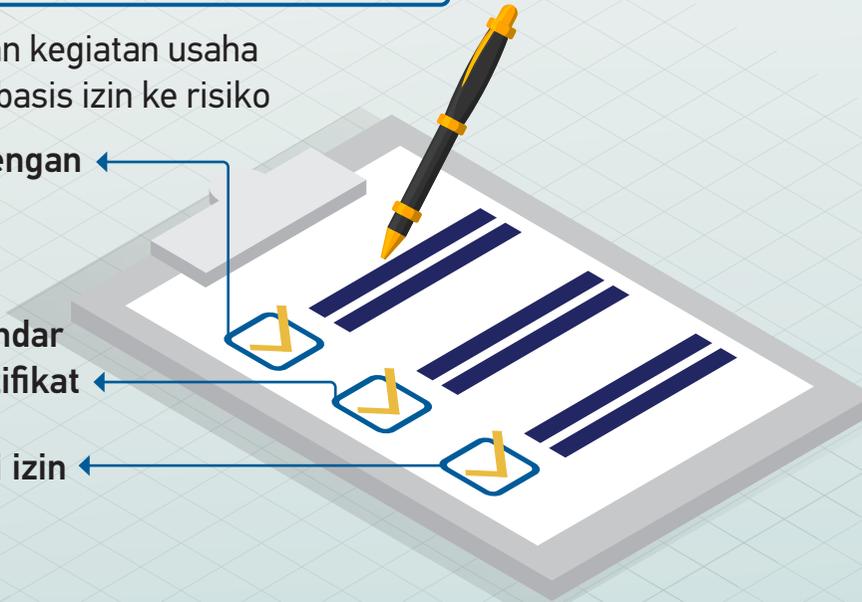
PERIZINAN BERBASIS RISIKO

Proses perizinan kegiatan usaha diubah dari berbasis izin ke risiko

Pendaftaran dengan nomor induk bersama (NIB)

Memenuhi standar profesi bersertifikat

Wajib memiliki izin



PERIZINAN SEKTOR

UU Cipta Kerja mengubah, menghapus dan/atau menetapkan peraturan baru

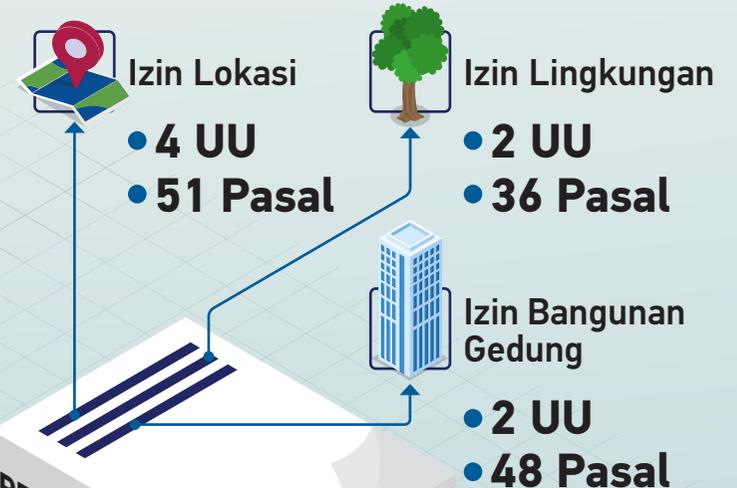


700 pasal

dari 52 UU yang mengatur perizinan diintegrasikan sehingga terpadu, efisien, dan efektif untuk mempermudah berusaha

PERIZINAN DASAR

Mengintegrasikan & menyederhanakan sejumlah UU yang mengatur perizinan dasar





KEMUDAHAN PERIZINAN DASAR

Menyederhanakan dan mengintegrasikan perizinan dasar dari sejumlah Undang-Undang yang terkait dengan izin lokasi, lingkungan dan bangunan gedung

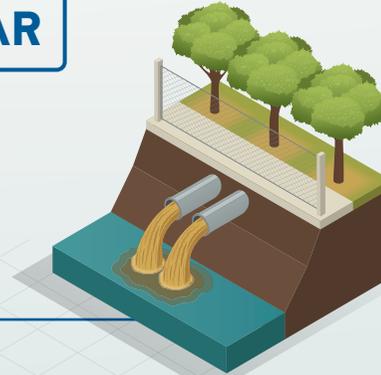
PENYEDERHANAAN 3 PERIZINAN DASAR



PERIZINAN LOKASI

**4 UU,
51 Pasal**

- Menggunakan peta digital RDTR
- Integrasi Rencana Tata Ruang & Rencana Zonasi
- Kebijakan Satu Peta untuk atasi tumpang tindih lahan
- Peninjauan RTRW guna menjawab dinamika pembangunan
- Kawasan hutan diintegrasikan dalam RTRW
- Percepatan penetapan RDTR



PERIZINAN LINGKUNGAN

**2 UU,
36 Pasal**

- Izin lingkungan dipertahankan
- Standar lingkungan untuk kegiatan risiko menengah
- AMDAL disusun profesi bersertifikat
- AMDAL untuk kegiatan risiko tinggi
- AMDAL dievaluasi pemerintah/profesi bersertifikat



PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG

**2 UU,
48 Pasal**

- Izin bangunan gedung dipertahankan
- Penerapan standar teknis bangunan gedung
- Bangunan tak berisiko tinggi bisa mengacu prototipe
- Bangunan berisiko tinggi wajib disetujui pemerintah
- Sertifikat laik fungsi diterbitkan Manajemen Konstruksi/Pengawas



KEMUDAHAN PERIZINAN SEKTOR

Menyederhanakan dan mengintegrasikan perizinan sektor dari puluhan Undang-Undang dan ratusan pasal yang terkait dengan banyak sektor dan menimbulkan ego sektoral.



PERIZINAN SEKTOR

- 1 Proses perizinan berbasis risiko, bukan berbasis izin
- 2 Kegiatan risiko tinggi wajib berizin
- 3 Kegiatan risiko tinggi berdampak pada:
 - KESEHATAN ● KESELAMATAN ● LINGKUNGAN ● PENGELOLAAN SDA
- 4 Kegiatan risiko menengah memakai standar
- 5 Kegiatan risiko rendah cukup mendaftarkan
- 6 Penilaian standar oleh profesi bersertifikat
- 7 Pemerintah mengawasi kegiatan berisiko tinggi

CAKUPAN PERIZINAN SEKTOR YANG DISEDERHANAKAN

	JUMLAH UU	JUMLAH PASAL
Pertanian	6	69
Pendidikan	5	48
Kesehatan Obat & Makanan	5	43
Kelautan & Perikanan	4	38
Energi & Sumber Daya Mineral	4	87
Transportasi	4	152
PUPR	4	85
Perdagangan	3	49
Pos, Telekomunikasi & Penyiaran	3	12
Pariwisata	2	9
Pertahanan & Keamanan	2	8
Kehutanan	1	12
Ketenaganukliran	1	9
Perindustrian	1	11
Keagamaan	1	15
TOTAL	46	647

SUMBER: UU CIPTA KERJA



PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI (PER SEKTOR)

Kelautan dan perikanan

- Integrasi perizinan usaha kapal perikanan diatur oleh KKP
- Kemenhub memberi dukungan terkait kebangsaan kapal dan *grosse* akta kapal

ESDM

- Pemberian insentif hilirisasi batu bara
- Materi sektor minerba & migas diatur dalam UU revisi

Pendidikan

- Izin satuan pendidikan merujuk sistem perizinan berusaha
- Pendidikan asing bisa diterapkan di KEK

Kawasan hutan

- Pelaksanaan DPCLS hanya oleh pemerintah, tanpa DPR
- Penyelesaian kebun rakyat & korporasi yang belum berizin
- Pelanggaran di kawasan hutan setelah UU Cipta Kerja dikenakan pidana

Pertanian

Tetap memberikan ruang untuk perlindungan produk pertanian dalam negeri

Penyiaran

- Migrasi penyiaran televisi telesterial dan teknologi analog ke digital dalam 2 tahun

Perumahan

- Pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

Pertahanan

- Kepemilikan modal industri alat utama dimiliki BUMN dan/ atau badan usaha lokal atas persetujuan Menteri Pertahanan



PERSYARATAN INVESTASI DIPERMUDAH

Dengan UU Cipta Kerja persyaratan untuk berinvestasi menjadi lebih sederhana

1. Menetapkan *priority list* atas bidang usaha yang didorong untuk investasi. Kriteria *priority list* mencakup: teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya.



2. Untuk kegiatan usaha UMKM dapat bermitra dengan modal asing

3. Status PMA hanya dikaitkan dengan **batasan kepemilikan asing**

PMA: PENANAMAN MODAL ASING

4. Ketentuan persyaratan investasi dalam **UU sektor dihapus karena akan diatur dalam Perpres Daftar Prioritas Investasi**

SUMBER: UU CIPTA KERJA

BIDANG USAHA TERTUTUP Disarankan atas kepentingan nasional, asas kepatutan, dan konvensi internasional

- Perjudian dan Kasino
- Penangkapan spesies ikan tertentu
- Budidaya dan produksi narkotika golongan 1

- Pemanfaatan koral dari alam
- Industri pembuatan senjata kimia
- Industri pembuatan bahan perusak lapisan ozon



PERCEPATAN PROSES IZIN BERUSAHA

UU Cipta Kerja membuat proses berusaha
menjadi lebih cepat dan mudah

MEREK

Penyederhanaan
dan percepatan
proses

IZIN

Penghapusan izin yang
mengganggu

BUMDes

Menjadi berbentuk
badan hukum

IMIGRASI

- **Visa kunjungan prainvestasi** dan jaminan visa dapat berupa deposit
- Perluasan **cakupan izin tinggal tetap** untuk rumah kedua

PENDIRIAN PT

- Penghapusan ketentuan modal awal
- Pendirian PT Perseorangan untuk UMK
- Penyederhanaan proses (berbasis digital) dan pengurangan biaya pendirian PT

PATEN

- **Percepatan** proses paten
- Pelaksanaan paten wajib dapat dilakukan melalui impor



PENGEMBANGAN BISNIS HALAL

UU Cipta Kerja mendorong pengembangan bisnis produk halal, termasuk mempermudah akses bagi usaha mikro dan kecil (UMK)

DUKUNGAN BAGI PELAKU UMK

- Penyederhanaan dan percepatan proses perizinan
- Sertifikasi halal ditanggung pemerintah
- Sertifikat halal berdasarkan pernyataan pelaku UMK sesuai standar halal BPJPH

MUI: MAJELIS ULAMA INDONESIA

BPJPH: BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

SUMBER: UU CIPTA KERJA, MUI



UPAYA MENJAMIN KEMUDAHAN BISNIS PRODUK HALAL

- Memperluas Lembaga Pemeriksa Halal
 - Ormas Islam
 - Perguruan tinggi negeri
- Fatwa halal tetap dikeluarkan oleh MUI
- Bila MUI tidak menerbitkan fatwa halal dalam jangka waktu yang ditetapkan, BPJPH mempercepat penetapan fatwa
- Mempercepat proses penerbitan sertifikat

PRODUK HALAL KIAN BERKEMBANG





PERLINDUNGAN DAN JAMINAN BAGI PEKERJA

UU Cipta Kerja bertujuan melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia.

JENIS PEKERJAAN

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

- Jaminan kompensasi setelah PKWT habis
- Hanya untuk pekerjaan tertentu

Alih Daya

- Tetap diatur UU sesuai putusan MK
- Pekerjaan yang dapat dialihdayakan tidak dibatasi

UPAH MINIMUM (UM)

- UM ditetapkan tingkat provinsi (UMP)
- UM kabupaten/kota ditetapkan bila memenuhi syarat tertentu
- UM sektoral dihapus namun yang lebih tinggi dari UM kabupaten/kota tidak diturunkan
- Kenaikan UM mengacu pertumbuhan ekonomi, inflasi & koefisien produktivitas

PESANGON

25 kali

19 kali ditanggung pemberi kerja

6 kali ditanggung program JKP

PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

- Pelaksanaan program melalui BPJS Ketenagakerjaan
- Tidak mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT, JP
- Tidak menambah beban iuran pekerja atau pengusaha

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Kemudahan hanya bagi TKA ahli seperti *maintenance* (darurat), vokasi, peneliti, serta investor dan *buyer*

WAKTU KERJA

- Penambahan untuk pekerjaan paruh waktu lebih fleksibel
 - Ekonomi digital paling lama 8 jam/hari dan 40 jam/minggu
- Pekerjaan khusus dapat melebihi 8 jam/hari (migas, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan)



9 KEMUDAHAN BAGI UMK

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberi kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Izin Tunggal bagi UMK

- Pemberian nomor induk berusaha (NIB) melalui Perizinan Berusaha secara elektronik
- NIB berlaku untuk semua kegiatan usaha: izin usaha, izin edar, standar nasional Indonesia (SNI) & sertifikasi produk halal

Pemerintah pusat & daerah bisa memberi insentif & kemudahan berusaha bagi usaha menengah & besar yang bermitra dengan UMK

Pengelolaan terpadu UMK

- Sinergi pemerintah pusat, daerah & stakeholder
- Pendampingan berupa dukungan manajemen, SDM, anggaran & sarana-prasarana
- Pemberian fasilitas: lokasi, sertifikasi, promosi, pemasaran

Kemudahan Pembiayaan & Insentif Fiskal

- Penyederhanaan administrasi perpajakan
- Pengajuan izin usaha tanpa biaya
- Insentif pajak penghasilan
- Insentif kepabeanan bagi UMK ekspor

Bantuan dan Perlindungan hukum

Pemerintah Prioritaskan Penggunaan DAK bagi pengembangan UMK

Kemudahan untuk Koperasi

- Pembentukan koperasi primer minimal 9 orang
- Rapat anggota tahunan bisa diwakilkan
- Koperasi bisa usaha syariah

Kemitraan UMK

Rest area, stasiun & terminal (angkutan, pelabuhan, bandara) untuk promosi & penjualan produk UMK dengan pola kemitraan

Produk UMK diprioritaskan dalam pengadaan jasa pemerintah

- Minimal 40% untuk produk UMK



DUKUNGAN BUMN UNTUK RISET DAN INOVASI

Dengan UU Cipta Kerja, pemerintah bisa menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung riset dan inovasi di pusat dan daerah

Dua kebijakan utama dalam RUU Cipta Kerja

1. Mendorong peningkatan investasi

- memperbaiki kemudahan berusaha
- meningkatkan daya saing
- menciptakan lapangan kerja

2. Mengembangkan UMKM

- melalui dukungan riset dan inovasi

Dampak Antara

1. Investasi meningkat signifikan
2. Jumlah UMKM bertambah
3. UMKM berkembang dan punya daya saing

Target Akhir

Tercipta lapangan kerja seluas-luasnya

Implikasi Revisi Undang-Undang BUMN

Dukungan BUMN untuk kepentingan penelitian dan inovasi

Sinergi riset dan inovasi antara BUMN dan perguruan tinggi

Tersedianya anggaran khusus untuk pembiayaan inovasi produk

Terbentuknya kelembagaan riset dan inovasi di daerah

- LANGKAH PENGOPTIMALAN RISET DAN INOVASI**
- Merevisi sebagian isi UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN
 - UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi TIDAK MASUK dalam Omnibus Law karena tidak mendesak untuk diubah



REFORMASI PERPAJAKAN MENARIK INVESTASI

Bertujuan meningkatkan daya tarik iklim
investasi dalam negeri

PPh

PPh: Pajak Penghasilan

Penghapusan PPh Dividen bagi
wajib pajak luar dan dalam negeri

**WNA yang menetap lebih dari
183 hari** bukan subjek pajak
dalam negeri (SPDN)

**WNI yang menetap
lebih dari 183 hari**
di luar negeri menjadi
subjek pajak luar
negeri (SPLN)

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- 1 Pemberhentian penyidikan tindak pidana ketika wajib pajak sudah melunasi utang pajak
- 2 Imbalan bunga atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 3 Sanksi administrasi atas koreksi pembenaran atau penyetoran pajak

PDRD

PDRD: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

**Peran
Pemerintah**

Mengevaluasi
Perda PDRD

Menetapkan
kebijakan fiskal
terkait PDRD,
termasuk
penetapan tarif
yang berlaku
secara nasional



OPTIMALISASI KAWASAN EKONOMI

Bertujuan memperluas peluang investasi dan mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional

Pemerintah daerah wajib mendukung KEK

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

Badan usaha bisa mengusulkan KEK dengan syarat telah menguasai lahan sedikitnya 50 persen

Kegiatan sektor **pendidikan dan kesehatan** bisa dilakukan di KEK

Administrator berwenang mengeluarkan perizinan yang berpegang pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Penambahan fasilitas untuk impor barang konsumsi di KEK nonindustri

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBBP)

Kelembagaan KPBBP

Badan Pengusahaan sebagai pengelola KPBBP berwenang mengeluarkan perizinan yang berpegang pada NSPK

**15 KEK
TERSEBAR DI
INDONESIA**



PERCEPATAN PENGADAAN TANAH

UU Cipta Kerja mempermudah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan investasi melalui pembentukan Bank Tanah.

Pengadaan Lahan

- Diatur dalam Bab VIII (pasal 122-147)

Bank Tanah Jamin 6 Kepentingan

- Kepentingan umum
- Kepentingan sosial
- Kepentingan pembangunan
- Pemerataan ekonomi
- Konsolidasi lahan
- Reformasi agraria

Tujuan Bank Tanah

- Efisiensi pengelolaan tanah
- Mempermudah pengadaan tanah untuk pembangunan

Alur Tugas Bank Tanah

- 1 Pengumpulan Tanah
- 2 Pengelolaan
- 3 Pendistribusian

Reformasi Agraria

- Penerima : Rakyat
- Minimal 30% menjadi Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA)

Pemberian hak pengelolaan (Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai

- Penerima : Kementerian/ Lembaga dan investor
- Jangka waktu 90 tahun



SUMBER: UU CIPTA KERJA

ORGANISASI BANK TANAH

1 Komite

- Ketua & anggota : para menteri ditunjuk Presiden & kepala daerah
- Tugas : mengangkat dewan pengawas & badan pelaksana

2

Dewan Pengawas

- Anggota : 7 orang (3 wakil pemerintah & 4 profesional pilihan DPR)
- Tugas: mengawasi badan pelaksana

3

Badan Pelaksana

- Kepala & Deputi



STANDARDISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Standardisasi bertujuan untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan berbagai regulasi

Menteri, kepala lembaga, atau pemerintah daerah sebagai **pelaksana kewenangan Presiden**

Penggunaan diskresi harus sesuai Asas-Asas Pemerintahan Umum yang Baik (AUPB)

Keputusan elektronik diproses melalui sistem elektronik

Perizinan

- NSPK perizinan berusaha berbentuk PP
- Penyederhanaan perizinan secara elektronik
- Permohonan perizinan sah bila telah melewati batas waktu SLA
- Pengawasan perizinan dapat dilakukan profesi ahli

Kepala daerah dapat menerbitkan **obligasi atau sukuk** untuk infrastruktur atau investasi penyediaan pelayanan publik

PERDA DAN PERKADA



- Ketentuan **pembatalan** peraturan melalui PP dicabut
- Pemerintah pusat melakukan **harmonisasi dan sinkronisasi** peraturan
- Pemerintah daerah yang **tidak menyesuaikan** peraturan dikenakan sanksi administratif

Ket:

NSPK : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Perda: Peraturan Daerah

Perkada: Peraturan Kepala Daerah

PP: Peraturan Pemerintah

SLA: *Service Level Agreement*



PENGENAAN SANKSI PROPORSIONAL

UU Cipta Kerja memberikan batasan yang jelas antara sanksi pidana dengan administratif

Pemisahan sanksi administratif dengan sanksi pidana

Mengutamakan pendekatan *ultimum remedium*

Diutamakan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, atau hukum administrasi

Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dengan Kepolisian, pengaturan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dikeluarkan dari UU Cipta Kerja



Memakai hukum pidana sebagai jalan terakhir, kecuali untuk pelanggaran yang berdampak negatif bagi keselamatan, keamanan, dan lingkungan →

